**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Karakteristik dari penyelenggaraan pemilihan umum adalah adanya partisipasi politik dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Marijan (2010:125) bahwa ikut serta di dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik warga negara. Melalui pemilihan umum, warga negara memilih para wakil yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Budiardjo (2008:369) mengatakan bahwa tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Begitupun sebaliknya, tingkat partisipasi politik warga yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Sejalan dengan hal tersebut, Setiadi (2013:129) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum.

 Partisipasi politik masyarakat erat kaitannya dengan status sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Sastroatmodjo (1995:91) bahwa status sosial memiliki kontribusi yang penting dalam mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Setiadi (2013:155) juga mengatakan bahwa masyarakat dengan status sosial yang rendah mempunyai partisipasi politik yang rendah pula. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang berstatus sosial rendah tidak mempunyai waktu bebas yang memadai untuk kegiatan politik.

 Pada tanggal 17 April 2019 Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum. Tentunya pemerintah mengharapkan partisipasi dari setiap warganya dan tidak menginginkan adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan. Akan tetapi, masih ada daerah dimana terdapat masyarakat yang partisipasinya rendah pada pemilihan umum tahun 2019 yang telah diselenggarakan tersebut, seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi, dimana di daerah tersebut masih banyak terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan umum tahun 2019 seperti data pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1 Persentase Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Sekernan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **No** | **Desa/Kelurahan** | **Pengguna Hak Pilih** | **Tidak Menggunakan Hak Pilih** | **Jumlah Data Pemilih (orang)** |
| **Jumlah (orang)** | **%** | **Jumlah (orang)** | **%** |
| 1 | Sengeti | 5.249 | 79% | 1.391 | 21% | 6.640 |
| 2 | Suak Putat | 1.048 | 92% | 85 | 8% | 1.133 |
|  3 | Rantau Majo | 735 | 85% | 134 | 15% | 869 |
| 4 | Pulau Kayo Aro | 958 | 85% | 172 | 15% | 1.130 |
| 5 | Pematang Pulai | 747 | 94% | 51 | 6% | 798 |
| 6 | Tantan | 1.430 | 90% | 152 | 10% | 1.582 |
| 7 | Kedotan | 1.017 | 91% | 101 | 9% | 1.118 |
| 8 | Keranggan | 575 | 92% | 53 | 8% | 628 |
| 9 | Berembang | 1.791 | 92% | 162 | 8% | 1.953 |
| 10 | Sekernan | 2.364 | 88% | 330 | 12% | 2.694 |
| 11 | Gerunggung | 406 | 94% | 25 | 6% | 431 |
| 12 | Tunas Baru | 1.135 | 88% | 155 | 12% | 1.290 |
| 13 | Bukit Baling | 4.551 | 84% | 847 | 16% | 5.398 |
| 14 | Tanjung Lanjut | 819 | 85% | 145 | 15% | 964 |
| **15** | **Suko Awin Jaya** | **3.788** | **69%** | **1.689** | **31%** | **5.477** |
| 16 | Tunas Mudo | 1.060 | 84% | 209 | 16% | 1.269 |
| **Rata-rata** | **87%** | **13%** |  |

*Sumber: Website Komisi Pemilihan Umum (KPU)*.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari enam belas desa di Kecamatan Sekernan, Desa Suko Awin Jaya memiliki tingkat persentase partisipasi paling rendah. Selain paling rendah dibandingkan dengan desa yang lain, persentase partisipasi masyarakat Desa Suko Awin Jaya juga dibawah rata-rata. Rata-rata pengguna hak pilih masyarakat Kecamatan Sekernan mencapai angka 87% sementara untuk pengguna hak pilih masyarakat Desa Suko Awin Jaya hanya mencapai angka 69%, yaitu dari 5.477 masyarakat Desa Suko Awin Jaya yang terdaftar dalam data pemilih, hanya 3.788 jiwa yang menggunakan hak pilihnya dan sisanya yaitu sebesar 1.689 jiwa atau sebesar 31% masyarakat Desa Suko Awin Jaya memilih untuk tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan umum tahun 2019.

Melihat fenomena diatas dan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 13 Mei 2019 di Desa Suko Awin Jaya. Jika dikaitkan dengan keadaan status sosial masyarakatnya, peneliti melihat sendiri adanya kesenjangan status sosial masyarakat disana, hal ini dapat dilihat dari tempat tinggal masyarakatnya, ada yang tinggal di rumah permanen dan mewah, tetapi tidak sedikit masyarakat yang tinggal dirumah yang sederhana dan bahkan ada juga masyarakat yang masih tinggal di rumah kontrakan selama 30 tahun dari awal pindah ke Desa Suko Awin Jaya hingga sekarang. Dilihat dari tingkat pendidikan formal masyarakatnya juga beragam, mulai dari tamatan Sekolah Dasar (SD) sampai tamatan Perguruan Tinggi. Untuk jenis pekerjaan masyarakatnya juga bervariasi, mulai dari TNI, Pegawai Negeri Sipil, Guru, Bidan, Peternak, Petani, Buruh, hingga tukang kayu dan pembantu rumah tangga. Pada tanggal 14 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Suko Awin Jaya Bapak Lukman Hakim, S.Pd. Beliau mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Suko Awin Jaya kurang tertarik untuk berpartisipasi pada saat pemilihan umum adalah mereka lebih memilih bekerja karena mayoritas masyarakat Desa Suko Awin Jaya adalah pendatang dan berprofesi sebagai buruh sehingga yang mereka utamakan adalah mencari uang. Pada hari yang sama yaitu tanggal 14 Mei 2019 peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Suko Awin Jaya yaitu Ibu Yuliana, Bapak Poniman (Ketua RT 11 di Desa Suko Awin Jaya), Bapak Ponijo, dan Ibu Een, sebagian besar dari mereka mengatakan lebih memilih bekerja dari pada libur hanya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang belum tentu membawa kesejahteraan karena menurut mereka siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin, tidak akan membawa pengaruh terhadap hidup mereka.

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Nuruddin Abdullah pada tahun 2016 dengan judul pengaruh status sosial ekonomi dan sosialisasi politik melalui media massa terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, hasil penelitiannya membuktikan bahwa adanya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif 2014 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nuruddin Abdullah dimana adanya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat, dan hasil observasi serta wawancara yang telah peneliti lakukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian kepada masyarakat di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan dimana desa ini memiliki tingkat partisipasi politik paling rendah pada pemilihan umum tahun 2019 dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Sekernan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada status sosial masyarakat dimana Surbakti (2010:185) mengatakan bahwa status sosial mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, sehingga judul dalam penelitian ini adalah “**PENGARUH STATUS SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI DESA SUKO AWIN JAYA KECAMATAN SEKERNAN”.**

**1.2 Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya persentase partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan yaitu hanya mencapai 69% atau dari 5.477 jiwa yang terdaftar dalam data pemilih, hanya 3.788 jiwa yang menggunakan hak pilihnya.
2. Masih terdapat masyarakat Desa Suko Awin Jaya yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2019 sebesar 31% yaitu sebesar 1.689 jiwa dari 5.477 jiwa yang terdaftar dalam data pemilih.
3. Persentase partisipasi politik masyarakat Desa Suko Awin Jaya berada pada urutan paling rendah diantara desa lainnya di Kecamatan Sekernan.
4. Masyarakat di Desa Suko Awin Jaya beranggapan lebih memilih bekerja dari pada berpartisipasi pada pemilihan umum yang belum tentu membawa kesejahteraan.

**1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini pada pengaruh status sosial terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan.

**1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat peneliti kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah Terdapat pengaruh status sosial terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan ?.

**1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh status sosial terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan.

**1.6 Manfaat Penelitian**

 Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. **Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding, pertimbangan, dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang di bidang dan permasalahan sejenisnya atau yang bersangkutan.

1. **Secara Praktis**

Kegunaan secara praktis dari hasil penelitian ini yaitu untuk memberikan sebuah gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan yaitu status sosial. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Politik sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengenai pendidikan politik bagi masyarakat untuk dapat memaksimalkan tugasnya dalam memberi pemahaman mengenai makna dan fungsi dari sebuah kegiatan politik sehingga masyarakat lebih tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih melihat dan menyentuh keberadaan masyarakat menengah kebawah. Sehingga masyarakat lebih aktif dalam berpartisipasi dan mengikuti segala macam rangkaian kegiatan politik, baik ditingkat nasional ataupun lokal tanpa berlandaskan tingkatan status sosial yang mereka miliki.

**1.7 Definisi Operasional**

Untuk mempermudah peneliti dalam mengukur variabel yang diteliti, maka dijelaskan definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Setiadi (2013:129) adalah kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Adapun indikator dari partisipasi politik yaitu peneliti menggunakan indikator menurut Lester Milbrath yaitu penonton, transisional, dan gladiator.

1. Status Sosial

Status sosial menurut Soekanto (2010:210) adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada status sosial *Achieved Status* yaitu status yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja dan butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Adapun indikator status sosial *achieved status* adalah tingkat pendidikan, profesi yang disandang, penghasilan, dan kepemilikan harta benda.